

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan terhadap sumber daya lahan akan selalu meningkat mengikuti laju pertumbuhan penduduk (Silda, 2019). Lahan tersebut dimanfaatkan menjadi pemukiman, perkebunan, lahan garapan, dan lainnya. Pemanfaatan lahan melebihi kemampuannya akan menurunkan produktivitas lahan (Achmad, 2021). Aktivitas pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan aspek ekologi serta nilai konservasi akan menyebabkan lahan terdegradasi mencapai tingkat kritis (Wahyuningrum dan Basuki, 2019).

Alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertanian atau kehutanan menjadi area pembangunan, menyebabkan wilayah resapan mengalami penyempitan, sehingga memicu terjadinya lahan kritis (Achmad *et al.*, 2020). Lahan kritis merupakan lahan yang tandus, gundul, dan tidak produktif (Kristianto *et al.*, 2021). Akibatnya terjadi penurunan kualitas kesuburan tanah, pasokan air semakin berkurang saat kemarau panjang serta banjir pada musim penghujan (Basuki *et al.*, 2020).

Merujuk pada hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang memaparkan tingkat deforestasi hutan di Indonesia sejak tahun 2021 hingga 2022 yaitu seluas 104.000 ha. Hasil perhitungan Yayasan Auriga Nusantara, angka deforestasi di Indonesia tahun 2023 mencapai 257.384 ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7 /2018 tentang penentuan lahan kritis di Indonesia memaparkan jumlah lahan pada tingkat kritis di seluruh Indonesia seluas 14.006.450 ha, sedangkan Provinsi Jambi memiliki lahan pada tingkat kritis seluas 213.985 ha.

Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang rentan mengalami kekritisian lahan adalah Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 hingga 2022 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 1430 ha pada 13 titik di Kabupaten Bungo (Maryam *et al.*, 2022). Selain itu, kekritisian lahan di Kabupaten Bungo juga disebabkan karena adanya potensi sektor pertambangan batu bara di Kecamatan Rantau Pandan seluas 1.943 ha (Febrialdi 2017). Tidak hanya pertambangan batu bara, terdapat juga pertambangan emas yang mengancam

kondisi lingkungan di Kabupaten Bungo. Berdasarkan data Kasatreskrim Polres Bungo tahun 2022 dalam Jolanda (2024), terdapat 10 tambang emas legal, dan 25 tambang emas tanpa izin (peti) *illegal*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tahun 2024 memaparkan luas perkebunan di Bungo mencapai 147.594 ha. Data perkebunan tersebut didominasi oleh jenis karet, sawit, pinang, kopi, dan coklat. Peningkatan kebutuhan lahan untuk areal perkebunan mengancam keberlangsungan lahan hutan. Alih fungsi lahan tersebut yang menyebabkan terjadinya lahan kritis. Berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Bungo yang diterbitkan tahun 2018, memaparkan bahwa luas kekritisian lahan di areal kerja KPHP Unit II Bungo mencapai 1.249 ha. Maka permasalahan terkait penyebab terjadinya lahan kritis di Kabupaten Bungo menjadi ancaman yang serius terhadap peningkatan luas lahan kritis di KPHP Unit II Bungo.

KPHP Unit II Bungo adalah unit pengelolaan hutan tingkat tapak di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-II/2010, Areal kerja KPHP Unit II Bungo seluas 52.727,72 ha. Namun setelah dilakukan telaah oleh BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang dan Sub Direktorat Pemolaan Direktur Jenderal PHPL Kementerian LHK berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Jambi lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.863/Menhut-II/2014, maka areal kerja KPHP Unit II menjadi 49.760 ha. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, berada di 6 (enam) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Bathin III Ulu, Rantau Pandan, Limbur Lubuk Mengkuang, Mukomuko Bathin VII, Bathin II Pelayang, dan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (RPHJP KPHP Unit II Bungo, 2018).

Dengan visi “Terwujudnya pengelolaan hutan produksi lestari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, menuju kemandirian KPHP”, membuktikan bahwa KPHP Unit II Bungo berperan penting dalam pengelolaan hutan. Hutan yang berada di KPHP Unit II Bungo menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah. Terdapat berbagai flora dan fauna yang harus dijaga kelestariannya. Tentunya permasalahan kekritisian lahan menjadi

tantangan serius. Sehingga perlu dilakukan pengawasan intensif terhadap kekritisan lahan ini.

Informasi tentang luas dan tingkat kekritisan lahan dapat diperoleh dengan cara memetakan lahan kritis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) (Auliana *et al.*, 2017). SIG berfungsi untuk meningkatkan analisis data spasial secara terpadu untuk perencanaan maupun pengambilan keputusan (Laura 2019). SIG berfungsi untuk mengklasifikasikan lahan kritis sesuai kriteria pada setiap kawasan, sehingga luas dan sebarannya dapat diketahui dengan efektif dan akurat (Kristianto *et al.*, 2021).

Berdasarkan uraian diatas mengenai isu kekritisan lahan, maka dilaksanakan penelitian mengenai lahan kritis di KPHP Unit II Bungo yang berjudul “**Analisis Spasial Tingkat Kekritisn Lahan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Bungo**”

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Bungo di Provinsi Jambi menghadapi berbagai tekanan yang berpotensi menyebabkan degradasi lahan, seperti alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas pertambangan emas dan batu bara. Tekanan ini menyebabkan terjadinya lahan kritis yang ditandai dengan menurunnya kualitas tanah, meningkatnya erosi, dan hilangnya tutupan vegetasi. Namun, informasi spasial mengenai tingkat kekritisan lahan di wilayah tersebut masih belum tersedia secara lengkap dan akurat. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kekritisan lahan serta sebaran luasan lahan kritis berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)?

1.3 Tujuan

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis tingkat lahan kritis pada KPHP Unit II Bungo menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)
2. Menganalisis sebaran luas lahan kritis pada KPHP Unit II Bungo menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan menjadi media untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang diajarkan pada masa perkuliahan. Selain itu, strategi kajian ini dapat dijadikan informasi serta menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini juga menjadi referensi bagi para pembaca yang berkepentingan.